

Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan Kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan

Desember 2025



BANK INDONESIA

SBDK Oktober 2025 meningkat, di tengah berlanjutnya penurunan biaya dana.

- SBDK Oktober 2025 meningkat secara bulanan dipengaruhi kenaikan biaya overhead, di tengah berlanjutnya penurunan biaya dana akibat membaiknya kondisi likuiditas.**
- Suku bunga kredit agregat menurun pada Oktober 2025, didukung relatif stabilnya suku bunga kredit baru secara bulanan. Transmisi suku bunga kebijakan membaik pada paruh kedua 2025, tecermin pada peningkatan dan konvergensi elastisitas suku bunga kredit baru.**
- Suku bunga kredit pada mayoritas sektor prioritas KLM mengalami penurunan dalam 6 bulan terakhir sehingga mendukung pertumbuhan kredit yang lebih optimal ke depan.**

Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)¹ Oktober 2025

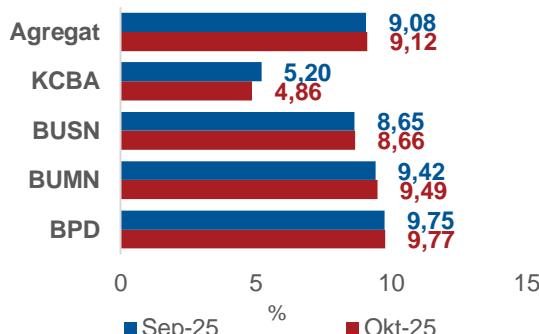
SBDK Oktober 2025 meningkat secara bulanan pada mayoritas kelompok bank. SBDK Oktober 2025 naik 4 basis points (bps) secara bulanan menjadi sebesar 9,12%. Kenaikan SBDK terjadi di tengah melambatnya pertumbuhan kredit perbankan sebesar 34 bps secara bulanan menjadi 7,36% pada Oktober 2025 (**Grafik 1**)². Kenaikan SBDK terjadi pada mayoritas kelompok bank, dengan kenaikan terbesar dikontribusikan oleh kelompok BUMN sebesar 7 bps menjadi 9,49%, diikuti oleh kelompok BPD dan BUSN masing-masing meningkat sebesar 2 bps menjadi 9,77% dan 8,66% (**Grafik 2**). Sebaliknya, SBDK pada kelompok KCBA mengalami penurunan sebesar 34 bps menjadi 4,86%. Kenaikan SBDK turut dipengaruhi faktor kenaikan biaya overhead, di tengah dampak positif pertumbuhan dana piyah ketiga (DPK) dan membaiknya kondisi likuiditas perbankan terhadap perkembangan biaya dana.



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank

Sumber: OJK (diolah)

Grafik 2. SBDK Oktober 2025*
Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank

Sumber: OJK (diolah)

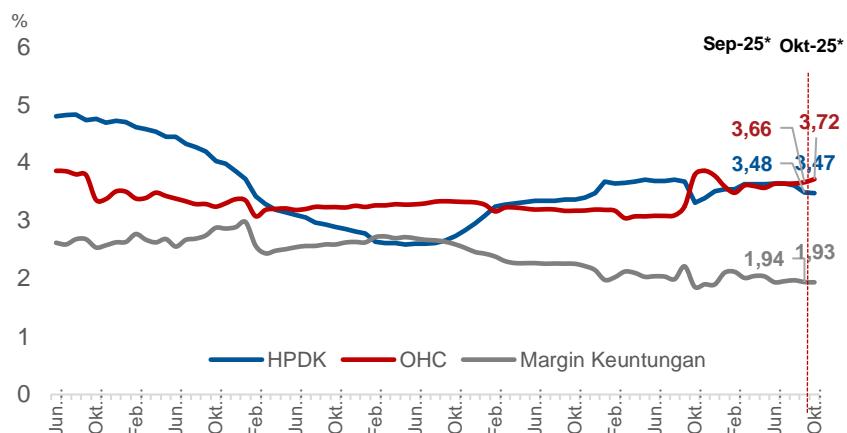
¹ SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk tiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK. Periode asesmen menggunakan data SBDK yang tersedia hingga publikasi laporan.

² Sejak Oktober 2024, komponen pembentuk SBDK mengalami perubahan dan penyesuaian, sejalan dengan pengaturan dalam POJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit. Lebih lanjut, angka SBDK Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024 disajikan ulang sejalan dengan koreksi data yang disampaikan bank pelapor pada periode dimaksud.

Perkembangan Komponen SBDK³

Kenaikan SBDK Oktober 2025 dipengaruhi kenaikan biaya *overhead*, di tengah penurunan biaya dana dan margin keuntungan. Biaya dana atau Harga Pokok Dana Untuk Kredit (HPDK) sedikit menurun sebesar 1 bps secara bulanan menjadi 3,47% pada Oktober 2025 (**Grafik 3**). Margin keuntungan perbankan juga tercatat menurun sebesar 1 bps menjadi 1,93% pada Oktober 2025. Penurunan HPDK dan margin keuntungan ini mencerminkan upaya bank untuk menjaga daya saing kredit, di tengah tekanan kenaikan biaya *overhead* (*Overhead Cost* atau OHC) yang meningkat sebesar 6 bps menjadi 3,72%.

Grafik 3. Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK* (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

Perbaikan kondisi likuiditas mendukung penurunan HPDK secara terbatas pada Oktober 2025.

Penurunan HPDK mencerminkan dampak tunda dari penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebesar 125 bps selama 2025, serta didukung dampak positif dari penempatan dana Pemerintah sebesar Rp 200 Triliun hingga Oktober 2025 dalam meredakan persaingan dana antarbank. HPDK turun secara bulanan pada mayoritas kelompok bank, terutama KCBA yang turun sebesar 20 bps menjadi 1,66%. Kelompok BUMN dan BPD mencatat penurunan yang lebih moderat sebesar 3 bps dan 1 bps secara bulanan menjadi 3,31% dan 4,41%. (**Grafik 4**). Sementara itu, biaya dana kelompok BUSN tercatat stabil pada level 3,50%. Pada kelompok KCBA, penurunan biaya dana ditopang penguatan dana murah dalam struktur pendanaan bank, terutama giro yang meningkat menjadi 77,57%, dan penurunan pangsa dana mahal (deposito) menjadi 19,61%. Pada kelompok BUMN, perbaikan likuiditas akibat penempatan dana SAL Pemerintah membuka ruang bagi penurunan suku bunga deposito dengan imbal hasil yang tinggi (*special rate*). Sementara itu pada kelompok BPD, penurunan biaya dana dikontribusikan deposan Pemerintah dan korporasi swasta, seiring dengan realisasi anggaran belanja daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran. Ke depan, berlanjutnya penurunan biaya dana diharapkan memperkuat insentif bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit agar lebih kompetitif sehingga mendukung permintaan kredit dan prospek intermediasi.

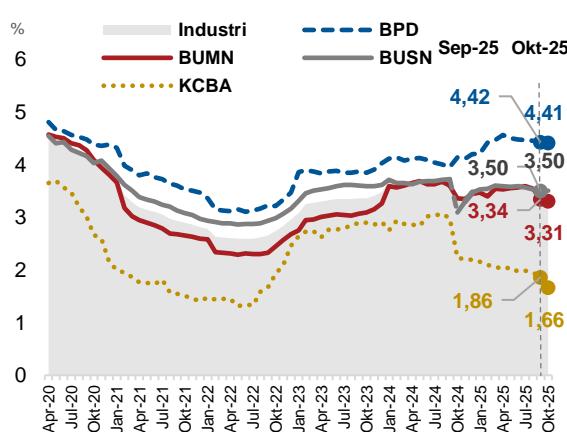
Biaya OHC meningkat pada mayoritas kelompok bank, kecuali KCBA. OHC meningkat sebesar 6 bps secara bulanan menjadi 3,72% pada Oktober 2025, terutama dikontribusikan oleh kelompok BUMN dengan kenaikan terbesar sebesar 10 bps menjadi 4,20%. Kenaikan OHC juga terjadi pada kelompok

³ SBDK terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk, yaitu (i) Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang terdiri dari DPK (Biaya DPK, biaya giro wajib minimum, biaya premi LPS) dan Biaya non-DPK (Biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia dan bank lain, Biaya surat-surat berharga yang diterbitkan, Biaya dana pinjaman yang diterima, dan lainnya); (ii) Biaya *overhead* (OHC) yang terdiri dari Perubahan nilai wajar liabilitas, Kerugian risiko operasional, Komisi/provisi/fee dan administrasi, Penyusutan/amortisasi, kerugian penurunan nilai aset non-keuangan, Beban tenaga kerja, Beban promosi, Kerugian penjabaran tansaksi valas, Beban lainnya, Biaya *overhead* lainnya; (iii) Margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam penyaluran kredit.

BPD dan BUSN yang masing-masing meningkat sebesar 7 bps dan 2 bps menjadi 3,61% dan 3,22% (**Grafik 5**). Secara umum, kenaikan beban lainnya terkait belanja barang dan jasa dalam rangka pengawasan kualitas kredit serta kenaikan beban tenaga kerja menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan biaya *overhead* pada kelompok tersebut. Di sisi lain, kelompok KCBA mencatat penurunan biaya OHC sebesar 22 bps menjadi 1,59%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pangsa biaya dana mahal, sehingga mengurangi kebutuhan biaya pemeliharaan deposito dan berdampak pada penurunan komponen biaya lainnya.

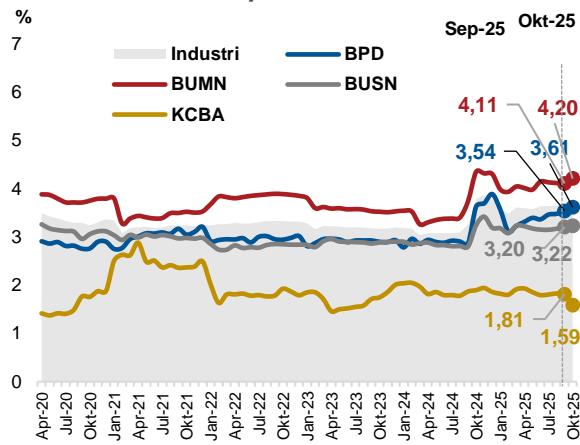
Margin keuntungan tercatat menurun terbatas, dikontribusikan oleh kelompok BPD dan BUSN. Pada kelompok BPD dan BUSN, margin keuntungan masing-masing turun sebesar 5 bps dan 1 bps menjadi 1,75% dan 1,94% pada Oktober 2025 (**Grafik 6**). Penurunan margin keuntungan mencerminkan strategi bank untuk menjaga suku bunga kredit agar tetap kompetitif di tengah meningkatnya tekanan biaya *overhead* dan persaingan di pasar kredit. Sebaliknya, kelompok KCBA berhasil meningkatkan margin keuntungan sebesar 8 bps secara bulanan menjadi 1,61%, didorong oleh penurunan biaya dana dan biaya *overhead* yang cukup signifikan. Kelompok BUMN juga mencatat peningkatan margin keuntungan secara terbatas sebesar 1 bps menjadi 1,98%, didukung perbaikan struktur biaya dana dan efisiensi operasional. Keberagaman perkembangan margin keuntungan mencerminkan perbedaan strategi dan kondisi masing-masing kelompok bank dalam menjaga kinerja profitabilitas, sesuai dengan tantangan yang dihadapi, model bisnis, dan karakteristik basis nasabahnya.

Grafik 4. Perkembangan HPDK* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



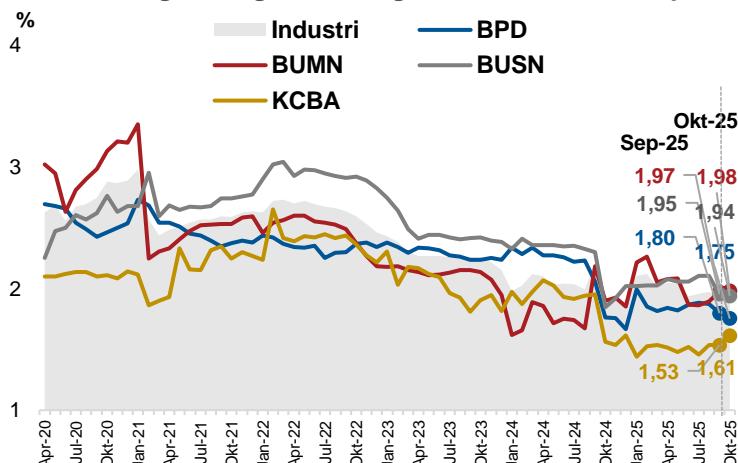
*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 5. Perkembangan OHC* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 6. Perkembangan Margin Keuntungan* Berdasarkan Kelompok Bank (%)



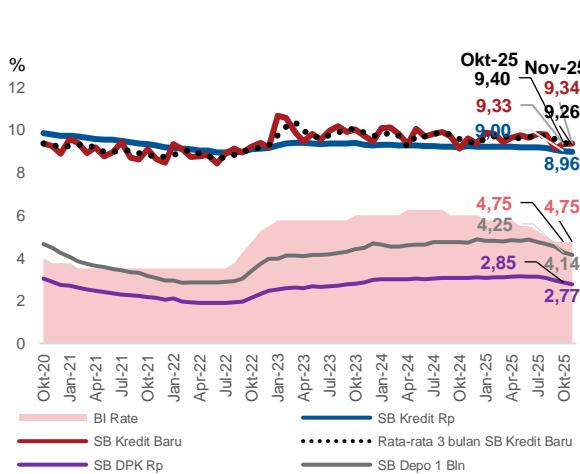
*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Perkembangan Suku Bunga Kredit

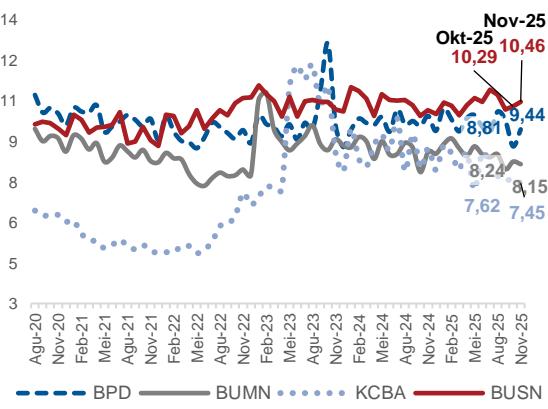
Suku bunga kredit Rupiah mengalami penurunan secara bulanan, didukung relatif stabilitas suku bunga kredit baru⁴. Pada November 2025, rata-rata tertimbang suku bunga kredit Rupiah turun sebesar 4 bps menjadi 8,96%, sedangkan suku bunga kredit baru cenderung stabil, hanya meningkat terbatas sebesar 1 bps menjadi 9,34% (**Grafik 7**). Perkembangan tiga bulan terakhir juga menunjukkan tren penurunan suku bunga kredit baru. Di tengah stabilitas suku bunga kredit baru, terdapat dinamika yang heterogen antar kelompok bank. Suku bunga kredit baru pada kelompok KCBA dan BUMN masing-masing menurun sebesar 17 bps dan 9 bps secara bulanan menjadi 7,45% dan 8,15%, sejalan dengan pencairan kredit baru yang terkonsentrasi pada segmen Kredit Korporasi dengan suku bunga yang rendah. Sebaliknya, suku bunga kredit baru pada kelompok BPD dan BUSN meningkat masing-masing sebesar 63 bps dan 17 bps menjadi 9,44% dan 10,46%, dipengaruhi oleh peningkatan pencairan kredit investasi untuk debitur Pemerintah maupun IKNB swasta dengan tenor di atas 1 tahun yang memiliki suku bunga lebih tinggi (**Grafik 8**). Dinamika ini mengindikasikan bahwa pergerakan suku bunga kredit baru bersifat fluktuatif dan dipengaruhi komposisi pencairan kredit baru. Adapun pada kelompok BPD, kenaikan suku bunga kredit baru juga dipengaruhi penyesuaian persepsi risiko kredit bank akibat penurunan kualitas kredit pada beberapa segmen debitur, yang mendorong kenaikan beban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Dari sisi penghimpunan dana, kondisi likuiditas perbankan yang membaik tercermin pada biaya dana yang terus menurun. Suku bunga DPK Rupiah pada November 2025 kembali turun sebesar 8 bps menjadi 2,77%, melanjutkan tren penurunan sejak Juli 2025 (**Grafik 7**). Penurunan ini mencerminkan dampak tunda dari pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia melalui penurunan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps sejak Agustus 2024, serta diperkuat oleh strategi moneter ekspansif untuk menjaga kecukupan likuiditas. Selain itu, penempatan dana Pemerintah di perbankan turut memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi likuiditas dan meredakan persaingan sumber dana berbiaya tinggi antarbank. Ke depan, prospek penurunan suku bunga dana dan kredit diprakirakan berlanjut, sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga global, pelonggaran kebijakan moneter domestik, serta kebijakan fiskal ekspansif.

Grafik 7. Perkembangan Suku Bunga Kredit Rp dan Suku Bunga DPK Rp (%)



Grafik 8. Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Berdasarkan Kelompok Bank (%)



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

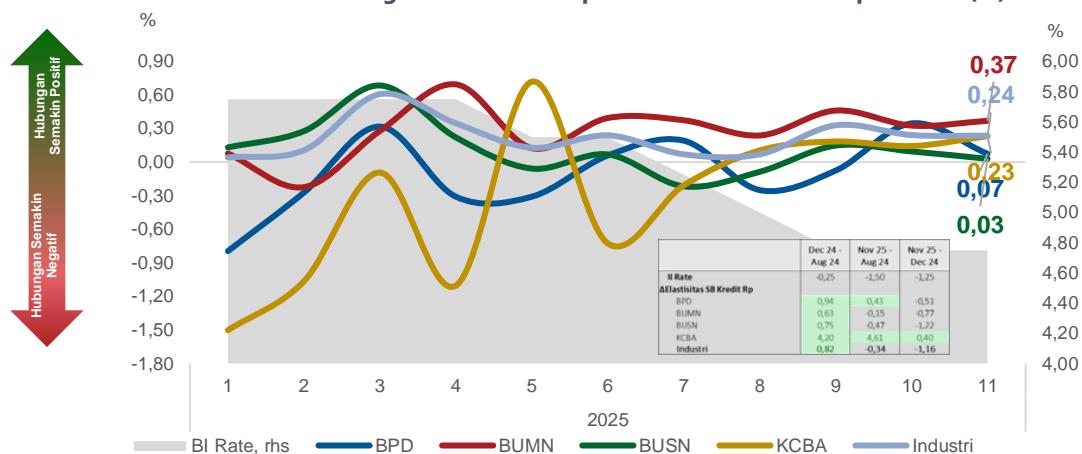
Sumber: LBUT Antasena (diolah)

⁴ Suku bunga kredit baru adalah tingkat harga yang ditetapkan bank selaku kreditur atas fasilitas kredit baru kepada debitur.

Perkembangan Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Sejak Agustus 2024

Elastisitas suku bunga kredit baru terhadap suku bunga kebijakan menunjukkan perbaikan pada paruh kedua tahun 2025. Transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga kredit baru terindikasi semakin membaik sejak Juli 2025, sebagaimana ditunjukkan oleh konvergensi elastisitas pada seluruh kelompok bank. Merespon penurunan suku bunga kebijakan sejak Agustus 2024, penyesuaian suku bunga kredit baru oleh perbankan menunjukkan konsistensi yang semakin kuat, teremin dari kenaikan elastisitas di level industri perbankan dari 0,04 pada awal 2025 menjadi sebesar 0,24 pada November 2025 (**Grafik 9**). Meskipun demikian, masing-masing kelompok bank memiliki kecepatan yang berbeda dalam merespon penurunan suku bunga kebijakan. Pada kelompok BUMN dan BUSN, suku bunga kredit menunjukkan keterkaitan yang sejalan dan persisten dengan pergerakan suku bunga kebijakan, sedangkan transmisi penurunan suku bunga pada kelompok BPD dan KCBA cenderung lebih fluktuatif. Efek tunda yang lebih lama pada kelompok BPD turut dipengaruhi oleh tantangan kenaikan risiko kredit yang dihadapi, sehingga penyesuaian suku bunga kredit perlu dilakukan secara lebih berhati-hati. Pada KCBA, komposisi kredit baru yang masih terkonsentrasi pada segmen Kredit Konsumsi, yang relatif lebih rigid dibandingkan jenis kredit lainnya, membatasi penyesuaian suku bunga kredit baru dalam merespon penurunan suku bunga kebijakan. Namun sejak November 2025, tren suku bunga kredit baru pada kelompok BPD dan KCBA lebih sejalan dengan suku bunga kebijakan, yang menunjukkan peningkatan respons dan perbaikan efektivitas transmisi dibandingkan paruh pertama tahun 2025.

Grafik 9. Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Rupiah Berdasarkan Kelompok Bank (%)



Keterangan:

- Elastisitas dihitung dengan rumus sebagai berikut = (% Perubahan SB Kredit Baru Rp) / (% Perubahan BI Rate)
- Periode dasar yang dipakai saat menghitung elastisitas adalah Agustus 2024, yakni awal periode penurunan BI Rate.

Sumber: LBUT Antasena (diolah)

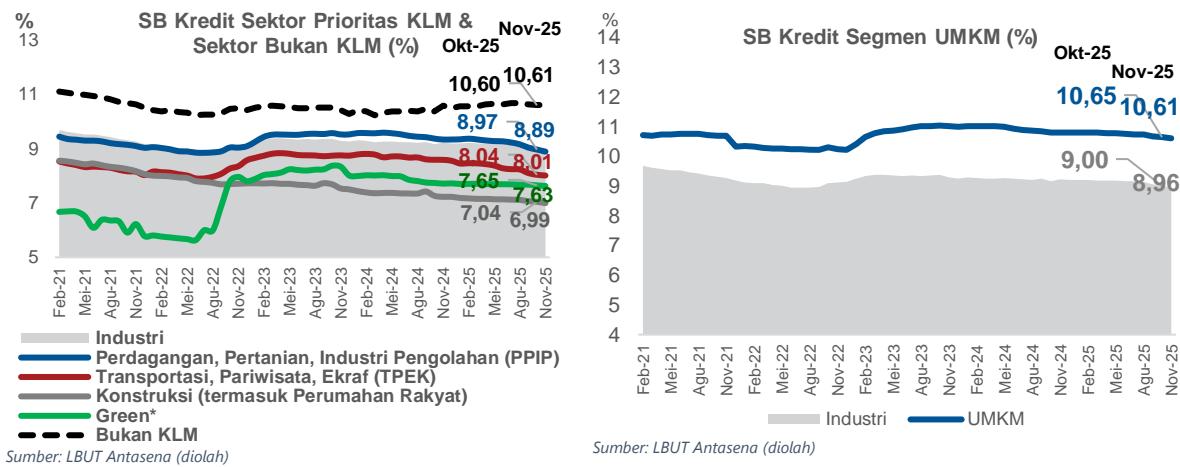
Suku Bunga Kredit Sektor Prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)⁵

Suku bunga kredit pada seluruh sektor prioritas KLM menurun dan berada pada level yang kompetitif. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga kredit untuk sektor prioritas KLM serta tetap positifnya persepsi risiko perbankan terhadap kualitas debitur pada sektor prioritas KLM. Kondisi ini sejalan dengan berlanjutnya perbaikan kualitas kredit, didukung peningkatan pengelolaan risiko. Pada November 2025 suku bunga kredit seluruh sektor prioritas tergolong lebih rendah dibandingkan rata-rata industri (**Grafik 10**). Seluruh

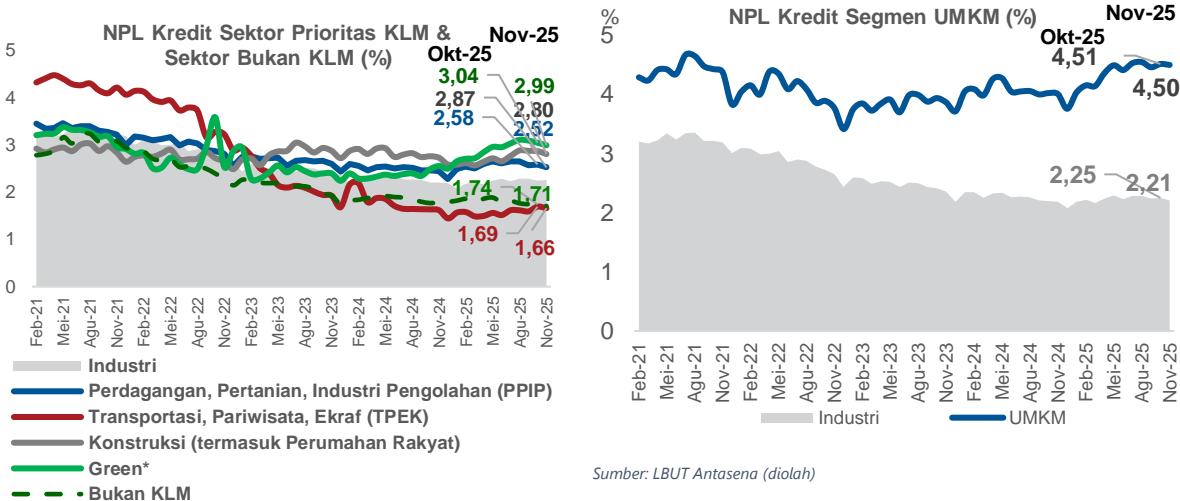
⁵ Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, sektor prioritas yang ditetapkan untuk memperkuat KLM antara lain: (1) sektor Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan; (2) sektor Transportasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif (Ekraf); (3) sektor Konstruksi (termasuk Perumahan Rakyat); (4) dan sektor Hijau atau Green. Selain sektor prioritas di atas, kebijakan KLM juga menyasar segmen UMKM dan Usaha Mikro (UMi). Penguatan cakupan sektor dan segmen prioritas tersebut telah berlaku sejak April 2025.

sektor prioritas KLM mengalami penurunan suku bunga kredit dengan penurunan terbesar dikontribusikan oleh PPIP⁶ dan Konstruksi secara berturut-turut sebesar 8 bps dan 6 bps menjadi 8,89% dan 6,99%. Penurunan pada sektor TPEK⁷ dan Green cenderung lebih moderat masing-masing sebesar 3 bps dan 2 bps menjadi 8,01% dan 7,63%. Penurunan tersebut sejalan dengan membaiknya pengelolaan risiko dan penurunan rasio NPL pada seluruh sektor prioritas, yang berada pada level dibawah 5% (**Grafik 11**). Perbaikan kualitas kredit ini mencerminkan prospek risiko sektoral yang membaik sehingga mendorong perbankan untuk mendorong ekspansi pembiayaan. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dalam memberikan insentif pada sektor prioritas KLM diharapkan dapat mendorong akselerasi pembiayaan yang optimal, termasuk kepada debitur UMKM yang mencatatkan penurunan tingkat suku bunga kredit sebesar 4 bps secara bulanan menjadi 10,61%, didukung dengan penurunan rasio NPL kredit UMKM secara terbatas sebesar 1 bps menjadi 4,50% pada November 2025.

Grafik 10. Perkembangan Suku Bunga Kredit Pada Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



Grafik 11. NPL Kredit Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



Keterangan:

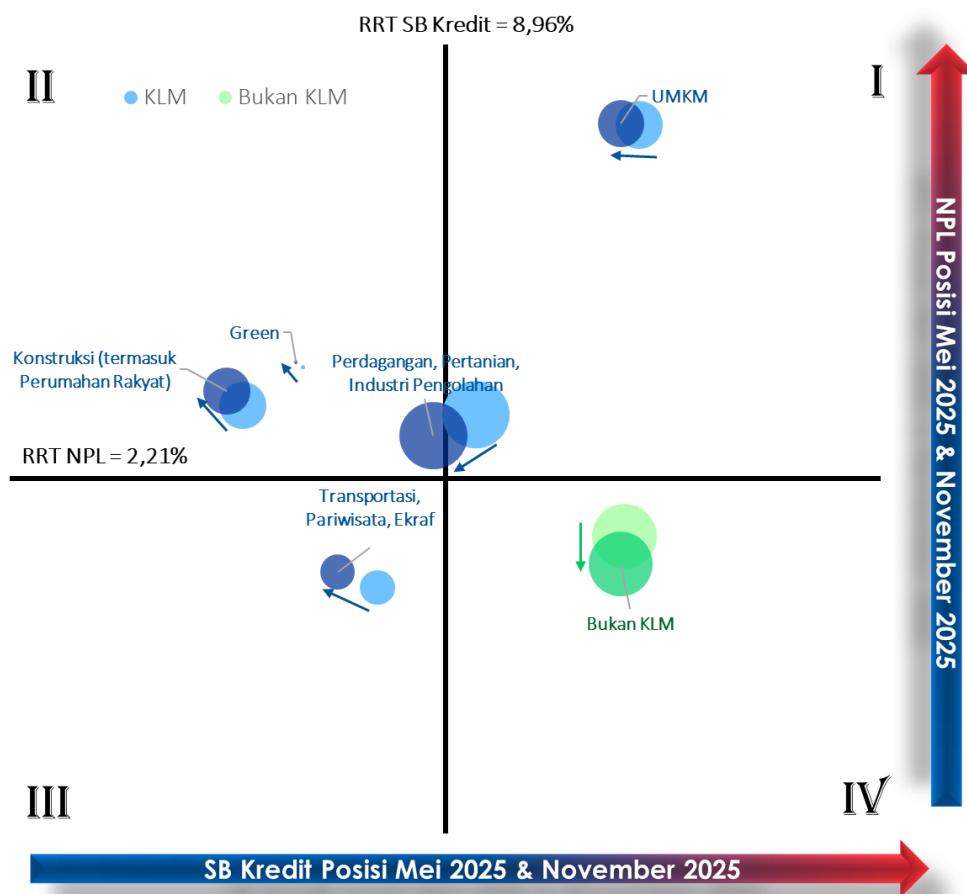
*Suku bunga sektor Hijau/Green untuk sub-sektor KPR dan KKB Hijau menggunakan asumsi rerata suku bunga pada KPR dan KKB Hijau dari bank-bank yang digunakan sebagai sampel.

⁶ PPIP = Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan

⁷ TPEK = Transportasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif (Ekraf)

Dalam perspektif yang lebih panjang (enam bulan terakhir), suku bunga kredit pada seluruh sektor prioritas KLM mengalami penurunan. Perkembangan ini mendukung prospek permintaan kredit yang lebih baik dari sektor prioritas KLM sehingga menopang pertumbuhan kredit ke depan. Penurunan suku bunga kredit ini menempatkan sektor prioritas KLM pada kuadran II dan III (**Grafik 12**) serta menjadikan suku bunga kredit sektor prioritas KLM lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga industri. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas kebijakan KLM dalam mendorong penyaluran kredit, sekaligus meningkatkan daya saing bank dalam melakukan intermediasi kepada dunia usaha dengan tetap menjaga pengelolaan kualitas kredit. Perkembangan serupa terjadi pada sektor non-KLM yang turut mengalami penurunan suku bunga kredit, dengan kualitas kredit yang membaik (kuadran IV). Sebaliknya, sektor UMKM meskipun mencatat penurunan suku bunga kredit, masih berada pada kuadran I sebagai dampak dari risiko kredit yang meningkat secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian suku bunga pada segmen UMKM cenderung lebih berhati-hati, sejalan dengan profil risikonya yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor prioritas KLM lainnya.

Grafik 12. Kuadran Pemetaan Suku Bunga dan NPL Sektor dan Segmen Prioritas KLM



Kuadran I: suku bunga tinggi, NPL tinggi

Kuadran II: suku bunga rendah, NPL tinggi

Kuadran III: suku bunga rendah, NPL rendah

Kuadran IV: suku bunga tinggi, NPL rendah

Keterangan:

Ukuran bubbles menunjukkan pangsa kredit.

Arah panah pada bubbles menunjukkan pergerakan dari Mei 2025 ke November 2025.

Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Tujuan dari transparansi asesmen SBDK adalah untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi terkait perkembangan suku bunga dasar kredit perbankan dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penetapan suku bunga kredit yang kompetitif dan efisien, diharapkan akan mampu menopang permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi.

Sebagai langkah awal, Bank Indonesia (BI) menyusun publikasi "Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan." Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank yang bersifat spesifik untuk tiap bank, antara lain Harga Pokok Dana untuk Kredit, biaya *overhead*, dan margin keuntungan. Meskipun faktor-faktor tersebut cukup beragam, publikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia, termasuk informasi statistik distribusi suku bunga dasar kredit. Melalui publikasi asesmen ini, disamping mendorong transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif, BI juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada konsumen kredit baik korporasi maupun rumah tangga. Selain itu, publikasi ini bertujuan meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Publikasi serupa merupakan sebuah praktik internasional yang sering dijumpai. Bank sentral negara lain seperti di Malaysia, India, dan Tiongkok juga meluncurkan kebijakan transparansi suku bunga kredit melalui publikasi *External Benchmark Rate*, *Loan Prime Rate*, dan *Base Rate*. IMF juga meminta tiap negara anggota untuk menyampaikan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan, yang merupakan salah satu *Financial Soundness Indicator* (FSI).